

**VALUASI PELAKSANAAN *LAND OFFICE COMPUTERIZATION* DALAM
RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

SRIE WIDIYA HASTUTI

NIM. 9981607

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak di bidang pertanahan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan alat komputer sebagai alat bantu mewujudkan sistem informasi pertanahan yang lebih baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang telah menerapkan sistem Local Area Network (LAN) sejak tahun 1995 sampai dengan 1998.

Badan Pertanahan Nasional dalam dekade terakhir juga sedang melaksanakan strategi mengenai pengelolaan data pertanahan dengan menggunakan teknologi komputer. Beberapa proyek telah dirintis salah satunya adalah proyek komputerisasi kantor pertanahan (*Land Office Computerization/LOC*) yang bertujuan melakukan pengelolaan data pertanahan secara digital. Salah satu kantor pertanahan yang akan menerapkan proyek LOC adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang terhitung mulai bulan Januari 1999, telah menggunakan program LOC tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek LOC tersebut dibutuhkan tiga komponen utama meliputi: perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia, dimana ketiga hal tersebut saling menunjang peningkatan pelaksanaan proyek LOC. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proyek LOC dilihat dari ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sumber daya manusia sebelum dan setelah dilaksanakannya proyek LOC.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara pelaksanaan proyek LOC sebelum dan setelah dilaksanakan proyek LOC. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini menunjukkan ketersediaan perangkat keras pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dianggap dapat mendukung proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perangkat keras yang tersedia, setelah pelaksanaan proyek LOC jumlahnya lebih banyak dibanding sebelum pelaksanaan proyek LOC, waktu penyelesaian pekerjaan setelah pelaksanaan proyek LOC lebih cepat dibanding pelaksanaan sebelum LOC, sehingga dari kelebihan tersebut pelaksanaan proyek LOC dapat meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Bila dilihat dari penerapan sistem aplikasi *Software* dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat membantu proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rata-rata penyelesaian permohonan sebelum dan setelah dilaksanakannya proyek LOC. Setelah dilaksanakannya proyek LOC rata-rata penyelesaian permohonan lebih besar bila dibanding

DAFTAR ISI :

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	9
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Anggapan Dasar.....	26
D. Definisi Operasional	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Variabel Penelitian	29
D. Sampel, Data dan Jenis Data	29

F. Teknik Pengumpulan data.....	31
G. Teknik Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Keadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	36
1. Organisasi dan Tata Kerja	36
2. Struktur Organisasi	37
B. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	39
C. Perkembangan Sistem Pelayanan	43
1. Perkembangan Sistem Pelayanan Pensertipikatan Tanah	43
a. Tahun 1960-1988	43
b. Tahun 1988-2003	44
2. Mekanisme Pelayanan Pensertipikatan Tanah	47
D. Komputerisasi yang Diterapkan	51
1. Sebelum Tahun 1999	52
2. Setelah Tahun 1999	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Komponen Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	56
1. Sebelum LOC	56
2. Setelah LOC	60
3. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Sebelum dan Setelah Dilaksanakan LOC	64
B. Komponen Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	66
1. Sebelum LOC	66
2. Setelah LOC	68
3. Penyelesaian Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebelum dan Setelah Dilaksanakan LOC	70

3. Perbandingan Sumber Daya Manusia Sebelum dan Setelah Dilaksanakan LOC.....	79
D. Biaya Operasional	80
E. Kualitas Produk Yang Dihasilkan	81
F. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan LOC	82
G. Efektifitas Dan Upaya Pemecahan Terhadap Kendala-Kendala Yang Dihadapi.....	86

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai karunia Allah Yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia adalah merupakan hajat hidup orang banyak baik masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Mengingat demikian pentingnya kedudukan tanah tersebut, maka harus dapat dikelola dan dikembangkan administrasi pertanahan yang sebaik-baiknya dengan tujuan agar terwujudnya Catur Tertib Pertanahan yang pada akhirnya dapat diwujudkan bahwa tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebenarnya bukan tanah yang mendatangkan kemakmuran akan tetapi penggunaan tanah yang di atasnya yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal inilah yang seringkali dapat menimbulkan ketegangan/konflik antar masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah, dan antar pemerintah terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan baik oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu badan pemerintah yang menangani masalah pertanahan di wilayah Republik Indonesia. Seperti diketahui luas wilayah Republik Indonesia begitu besar yang membentang mulai dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu pekerjaan yang menjadi

pertanahan. Pelayanan tersebut oleh masyarakat masih dirasakan belum sesuai dengan harapannya, karena pelayanan kepada masyarakat dari Badan Pertanahan masih dirasakan lambat, sulit, berbelit-belit, mahal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kesan tersebut haruslah merupakan tantangan bagi aparat BPN untuk mengelola bidang pertanahan dengan baik dan bersistem serta berkesinambungan dengan berbagai upaya dan usaha. Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, BPN telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparaturnya dalam mengantisipasi permintaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Upaya tersebut demi terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

Tertib administrasi pertanahan sangat perlu dilakukan dengan tujuan agar terselenggaranya sistem administrasi pertanahan yang lengkap dan rapi untuk menambah kelancaran pelaksanaan tugas karyawan kantor pertanahan. Sedangkan lancarnya pelaksanaan tugas akan mempengaruhi peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Negara Agraria (1997: 280):

“ ... sasaran yang ingin dicapai oleh segenap aparat Badan Pertanahan Nasional di dalam mengemban tugas-tugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, yaitu “ Catur Tertib Pertanahan” sebagaimana tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979, yaitu : ... 2. Tertib Administrasi Pertanahan, yaitu terselenggaranya sistem administrasi pertanahan yang lebih lengkap dan rapi, ... Dalam Pelita V ini diharapkan semua proses sertifikat sesuai dengan kebutuhan ... ”

Dengan teknik pengelolaan sistem pelayanan secara manual suatu organisasi akan mengalami berbagai kekurangan terutama dalam hal kecepatan pelayanan serta keakuratan hasil proses, karena keakuratan dan kecepatan pelayanan yang harus diberikan BPN kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berpengaruh pada kebutuhan dan keharusan mempergunakan komputer pada perusahaan dan kantor-kantor pemerintah di Indonesia, maka upaya pemanfaatan komputer di kantor pertanahan diarahkan untuk mempercepat proses/operasional pelayanan di bidang pertanahan maupun memberikan informasi pertanahan, pengendalian atau monitoring proses pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali serta pengolahan dan penyajian data. Guna mengantisipasi kecepatan dan keakuratan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, BPN memerlukan suatu sistem informasi yang mampu menangani berbagai pekerjaan di bidang pertanahan, oleh karena itu dibentuk proyek komputerisasi yang disebut *Land Office Computerization* (LOC) yang merupakan langkah awal BPN dalam membangun suatu sistem informasi dengan menggunakan komputer.

Land Office Computerization pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dengan berbasis sistem komputer. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Spanyol. Pelaksana utama dari

sesuai dengan proyek komputerisasi pelayanan kantor pertanahan (*Land Office Computerization*) pada phase I adalah 22 kantor yang terdiri dari 1 kantor pusat, 1 pusat pelatihan, 8 kantor wilayah, dan 12 kantor pertanahan. Salah satu kantor pertanahan yang memperoleh fasilitas LOC tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Dalam prosesnya, LOC bertujuan untuk membangun sistem komputer mulai dari pengadaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak sistem, jaringan komputer, sampai perangkat lunak aplikasi pelayanan yang akan digunakan dalam proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Pelaksanaan komputerisasi kantor pertanahan sangat mendukung terselenggaranya administrasi pertanahan yang cepat, lengkap, dan rapi. Aplikasi sistem komputerisasi pertanahan bertujuan untuk membantu para pelaksana dan unsur pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pertanahan secara efektif, efisien, dan terkendali. (*General Overview*, Badan Pertanahan Nasional, *Land Office Computerization Project-Phase IIA*, 2002: 12). Ada 3 (tiga) hal pokok yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek LOC yaitu tersedianya perangkat keras, tersedianya perangkat lunak dan tersedianya sumber daya manusia, dimana ketiga hal tersebut saling menunjang peningkatan pelaksanaan proyek LOC. Keuntungan komputerisasi pada kantor pertanahan adalah dapat dengan cepat penyelesaian pekerjaan yang volumenya besar, penggunaan waktu yang lebih cepat, dan revisi data

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang volume pelayanan pertanahannya relatif tinggi adalah salah satu kantor pertanahan yang dijadikan *pilot project* pelaksanaan proyek komputerisasi kantor pertanahan. Lokasi Kabupaten Semarang yang strategis sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah, sebagai pintu gerbang arah lalu lintas/transportasi dan perdagangan dari arah selatan menuju ke ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sebagai pusat pengembangan daerah industri, memberikan kelebihan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk ditunjuk oleh pusat untuk menjadi salah satu kantor yang melaksanakan proyek LOC.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengevaluasi pelaksanaan proyek *Land Office Computerization* di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dengan judul :

“EVALUASI PELAKSANAAN *LAND OFFICE COMPUTERIZATION* DALAM RANGKA PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah penyediaan perangkat keras (*hardware*) dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat mendukung proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat?
2. Apakah penerapan sistem aplikasi *software* dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat membantu proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien?
3. Apakah sumber daya manusia (*brainware*) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan proyek LOC telah tersedia sesuai kebutuhan yang diinginkan?

C. Pembatasan Masalah

Proyek Komputerisasi Kantor Pertanahan (*Land Office Computerization*) adalah suatu proyek bantuan luar negeri dari Pemerintah Spanyol. Pelaksanaan bagian proyek LOC phase I dikerjakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Perjanjian proyek lanjutan LOC phase 2A ditandatangani di Madrid, Spanyol pada tanggal 27 Agustus 1999 yang dikerjakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2001. Proyek LOC phase 2B direncanakan dilaksanakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Badan Pertanahan Nasional menargetkan pada tahun 2003 semua pelayanan pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional baik di pusat, Kanwil

Dalam *General Overview*, Badan Pertanahan Nasional, *Land Office Computerization Project-Phase IIA* (Anonim,2002: 12) disebutkan, bahwa :

Pengembangan suatu kantor pertanahan nonkomputerisasi menjadi kantor pertanahan berbasis komputer yang efektif, efisien dan terkendali membutuhkan beberapa hal pokok, yaitu : tersedianya perangkat keras (komputer), tersedianya perangkat lunak dan tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Penelitian ini membahas masalah pada evaluasi pelaksanaan LOC pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang meliputi: (1) penyediaan perangkat keras (*hardware*), (2) penerapan sistem aplikasi *software* dan (3) ketersediaan sumber daya manusia (*brainware*). Walaupun pelaksanaan LOC pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pemasangan sistemnya dimulai dari tahun 1998 namun pelaksanaan secara efektif baru dapat dimulai pada bulan Januari 1999, oleh karena itu penelitian ini yang dievaluasi adalah pelaksanaan LOC yaitu pada periode Januari 1999 sampai dengan Desember 2000 yang merupakan awal pelaksanaan proyek LOC dan pada periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2002 yang merupakan pelaksanaan proyek LOC phase II. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan LOC peneliti menggunakan pembandingan sistem pelayanan sebelum pelaksanaan LOC yaitu dari Januari 1997 sampai dengan Desember 1998.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah penyediaan perangkat keras (*hardware*) dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat mendukung proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem aplikasi *software* dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat membantu proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.
- c. Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia (*brainware*) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan proyek LOC telah tersedia sesuai kebutuhan yang diinginkan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan mengenai pelaksanaan pelayanan dengan sistem *Land Office Computerization* bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
- b. Untuk bahan pertimbangan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam membuat kebijaksanaan dan rencana dalam upaya peningkatan pelaksanaan Proyek *Land Office Computerization* pada tahap berikutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang sebelum dan setelah dilaksanakan Proyek *Land Office Computerization* (LOC), dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyediaan perangkat keras (*hardware*) dalam pelaksanaan Proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat mendukung proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perangkat keras yang tersedia, setelah pelaksanaan proyek LOC jumlahnya lebih banyak dibanding sebelum pelaksanaan proyek LOC. Waktu penyelesaian pekerjaan setelah pelaksanaan proyek LOC lebih cepat dibanding pelaksanaan sebelum LOC, sehingga dari kelebihan tersebut pelaksanaan proyek LOC dapat meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
2. Penerapan sistem aplikasi *Software* dalam pelaksanaan proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat membantu proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat lebih efektif. Hal ini dapat

LOC rata-rata penyelesaian permohonan lebih besar bila dibanding sebelum dilaksanakannya proyek LOC.

Proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih efisien dibanding dengan sebelum pelaksanaan proyek LOC. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga administrasi pelayanan sertipikat, setelah pelaksanaan proyek LOC jumlah tenaga administrasi lebih sedikit dari sebelum pelaksanaan proyek LOC.

3. Sumber daya manusia (*brainware*) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan proyek LOC belum tersedia sesuai kebutuhan yang diinginkan, karena sebagian besar pegawai belum menguasai sepenuhnya aplikasi LOC.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Proyek LOC antara lain :
 - a. Anggaran yang tersedia untuk dana pemeliharaan dan dana operasional tidak mencukupi.
 - b. Jumlah komputer untuk penggambaran (*graphical*) yang tersedia masih kurang dibandingkan dengan volume pekerjaan yang tinggi.
 - c. Kendala pada fleksibilitas program LOC untuk menambah *reedit* program terhadap penambahan prosedur dan perubahan peraturan di bidang pertanahan.
 - d. Sumber daya manusia yang terbatas baik dalam hal kualitas maupun

mengikuti pelatihan aplikasi LOC belum diperhatikan, walaupun ada pelatihan yang diadakan tetapi mutasi pegawai tidak memperhitungkan hal tersebut.

B. Saran

Pelaksanaan Proyek LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam rangka pelayanan pertanahan kepada masyarakat seharusnya memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Perlu pembaharuan dan penambahan *hardware* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.
2. *Software* yang sudah diterapkan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kantor dengan melibatkan sumber daya manusia dari kantor pertanahan yang menguasai tentang teknik komputer dan mempunyai pengetahuan tentang pendaftaran tanah.
3. Perlu diterapkan sistem pelatihan yang standart agar dapat membentuk pegawai yang mampu mengimplementasikan dan mengoperasikan serta memelihara sistem yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Pemanfaatan Perangkat Komputer Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
- , 2002, *General Overview*, Badan Pertanahan Nasional, PT. Jasindo Abadi Utama, Cimsa Ig. AIE, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Haedar Ali, Tubagus, 1992, *Prinsip-prinsip Network Planning*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Moleong, J. Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nawawi, Hadari, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nitisemito, Alex, Ec dan Umar Burhan, 1991, *Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek*, Bumi Aksara, Jakarta
- Paryadi, Sri, 1997, *Studi Komparatif Tentang Penerapan Sistem Informasi Pertanahan Dengan Cara Manual dan Local Area Network di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*, *Skripsi, DIV Manajemen Pertanahan*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, tidak diterbitkan.
- Prasetyo, Djoko dan Irmansyah Efendi, 1994, *Pengenalan Komputer, Disk Operating System, Wordstar, Andi Offset*, Yogyakarta
- Soemadi, Herutomo, 2001, *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta

Walijatun, Djoko, 2000, Pelayanan Prima di Bidang Pertanahan Sebagai Bagian Dari Reinventing Government, *Seminar Nasional Pertanahan*, makalah dalam rangka Dies Natalis, tanggal 26 Pebruari di Yogyakarta.

Widianto, Tjahyo, 1997, *Mendambakan Sistem Informasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Tingkat II*, Badan Pertanahan Nasional, Sub Direktorat Sistem Informasi Pertanahan, Jakarta

Wido, 1997, *Komputer Sebagai Alat Bantu Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Pertanahan*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Peraturan-Peraturan :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 tentang Tugas dan Fungsi Keagrariaan Berada Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor Agraria Kabuapten/Kotamadya
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
- Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan
- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1994 tentang Percontohan Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan